

## TAJUK RENCANA

### Dua Kebijakan Baru Haji

ADA dua kebijakan baru terkait penyelenggaraan haji tahun 2024. Pertama, jemaah calon haji sudah bisa mencil Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sejak sekarang sampai masa pelunasan dibuka. Kedua, penetapan istitha'ah kesehatan dilakukan sebelum masa pelunasan. Karena itu sejak sekarang para calon haji sudah mulai melakukan cek kesehatan dan mereka yang tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan nantinya tidak bisa melakukan pelunasan biaya haji.

Pemerintah sudah menetapkan, masa pelunasan Bipih akan dibuka mulai 9 Januari sampai 6 Februari 2024 (tahap pertama). Kemudian akan dibuka pelunasan tahap kedua mulai 20 Februari sampai 8 Maret untuk jemaah gagal sistem/gagal pembayaran, penggabungan mahram, pendamping lansia dan pendamping disabilitas. Sedang penerbangan haji akan dimulai 12 Mei 2024.

Sebagaimana diberitakan KR (Kamis, 14/12), kebijakan jemaah bisa mencil pembayaran Bipih disepakati dalam Raker Komisi VIII DPR dan Kemenag pada 27 November 2023. Komisi VIII DPR

RI meminta Kemenag bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji bagi jemaah 1445 H/2024 M.

Diperbolehkannya mencil ini kiranya penting, agar jika jemaah sudah mempunyai uang bisa mulai disetorkan ke BPS dan tidak digunakan terlebih dahulu untuk keperluan lain. Sebab dalam kenyataannya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, saat dibuka masa pelunasan, selalu saja ada jemaah yang belum bisa melakukan pelunasan, sehingga belum bisa berangkat haji meski saat itu sudah termasuk berhak lunas. Tentu saja kenyataan ini tidak diharapkan.

Bahkan sebaiknya proses pencila Bipih dibuka sepanjang masa, tidak hanya setelah BPIH ditetapkan sampai masa pelunasan dibuka. Artinya, setelah jemaah melakukan setoran awal Rp 25 juta dan sudah mendapat nomor porsi, sambil menunggu masa pemberangkatan bisa

menambah setoran. Jadi, sewaktu-waktu punya uang bisa disetorkan ke BPS, karena kalau disimpan di rekening lain bisa jadi akan diambil saat ada suatu keperluan. Tapi kalau sudah disetor ke BPS Haji, maka tidak bisa diambil. Selain itu saat masa pelunasan kewajibannya sudah semakin ringan, karena tidak perlu mengumpulkan uang banyak dalam waktu tidak lama. Apalagi dari tahun ke tahun biaya haji akan terus naik, lebih-lebih kalau subsidi dari nilai manfaat BPKH dikurangi secara signifikan.

Penentuan istitha'ah kesehatan sebelum melakukan pelunasan juga penting. Dengan begitu, mereka yang berangkat haji betul-betul bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Berbeda dengan dulu, orang yang sudah tidak bisa mandiri, misalnya makan harus disuapi atau tidak bisa memakai pakaian sendiri masih bisa berangkat haji. Tentu hal ini akan merepotkan orang lain. Apalagi kalau tidak ada pendamping dari keluarga.

Untuk itu Menteri Kesehatan RI sudah menetapkan standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istitha'ah kesehatan jemaah haji, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI NO. HK.01.07/MENKES/21118/2023. Dalam hal ini ada 4 tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan medis (medical check up). Pemeriksaan medis dasar (wajib bagi jemaah haji sebagai syarat pelunasan haji). Kedua pemeriksaan kognitif. Pemeriksaan ini untuk menguji kemampuan berpikir pada jemaah haji resiko tinggi. Pemeriksaan kesehatan mental, untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat dan konsentrasipada jemaah haji resiko tinggi. Serta pemeriksaan activity daily living (ADL) untuk mengetahui kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji resiko tinggi.

Semoga para calon haji berhak lunas nantinya bisa melakukan pelunasan semuanya. Sedang mereka yang karena kondisinya dinyatakan tidak istitha'ah kesehatan bisa menerima kenyataan dengan lapang dada, karena kewajibannya melaksanakan haji sudah gugur. □-d

## Apa Kabar Lembaga Pemantau Media?

PEMILIHAN umum, tinggal dua bulan lagi. Seperti di tahun 2014 dan 2019, peristiwa politik ini akan tercatat sebagai pemilu dalam budaya digital (*digital electoral culture*), mendampingi pemilu yang sesungguhnya. Mengapa? Karena penggunaan media digital untuk kampanye para kandidat, menguatnya ruang percakapan virtual sebagai ajang kontestasi antarpemilihan kandidat, disertai keriuhan-ujaran kebencian, mencederai proses penyelenggaraan pemilu.

Ciri Pemilu digital ada empat: keterlibatan pemilih atau pendukung sebagai produsen informasi politik di luar lembaga resmi seperti KPU. Kedua kaburnya batas antara jurnalis, influencer dan kreator konten, ketiga keterlibatan platform global seperti Facebook dan YouTube sebagai moderator. Dan keempat tersedianya informasi yang objektif berdampingan dengan disinformasi. Ada juga fenomena anonimisasi pemilih akun media sosial, dan hibrida komunikasi politik online-offline.

Dalam iklim informasi kepemiluan yang keruh, tercemar akibat kerja yang kabur antara jurnalistik dan non-jurnalistik, maka sangat diperlukan suatu kerja pemantauan media, yang membantu masyarakat mengembangkan literasi kepemiluan. Pemilu digital yang sehat, membutuhkan empat aktor sekaligus: media jurnalistik yang independen, jurnalis profesional, pembaca atau konsumen kritis dan pemantau media berbasis masyarakat. Lembaga pemantau adalah pilar keempat informasi pemilu yang berkualitas.

### Pemantau Media

Sejak reformasi 1998, terdapat sejumlah model kelembagaan pemantau di Indonesia. Pertama, model berbasis akademik, melakukan riset media sebagai tugas resmi. Kedua, model lembaga sosial non-kampus, yang bercirikan kerja advokasi yang digalang oleh LSM. Ketiga, model lembaga survei media komersial, berbasis korporasi nasional dan internasional seperti dilakukan AC

### Masduki

Nielson. Selain itu, ada model keempat yaitu lembaga atau program pemantau organik yang berbasis organisasi pers/jurnalis, termasuk yang diselenggarakan oleh regulator seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Terdapat sejumlah pendekatan dalam pemantauan. Mulai yang berbasis isu konten dengan melihat dimensi etik dan teknis dari suatu berita (misalnya



KR-JOKO SANTOSO

Remotivi), yang berbasis pemantauan kinerja regulasi dan regulator media seperti PR2Media di Yogyakarta, berbasis gerakan literasi (digital) yang dikerjakan para dosen yang tergabung dalam Jaringan Peneliti Literasi Digital (Japelidi), berbasis minat, selera dan rating penonton seperti AC Nielson dan berbasis riset holistik oleh perguruan tinggi atau pusat studi.

Model kelembagaan dan pendekatan mana yang tepat? Tak ada jawaban pasti. Secara ideal semua model harus ada yang mengerjakan. Kesadaran baru yang perlu dibangun adalah bahwa situasi berubah drastis karena faktor digitalisasi

## Bank BPD DIY dan SDM Unggul

BANK BPD DIY sebagai bank masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini telah menunjukkan prestasi membanggakan. Sejak 1998 - 2023 secara berturut-turut berhasil memperoleh predikat kinerja esangat bagusi dari salah satu majalah perbankan Indonesia. Untuk mempertahankan prestasi di masa depan tentu tidak mudah karena banyak tantangan antara lain dari perubahan lingkungan bisnis, yang akan dihadapi Bank BPD DIY. Faktor utama keberhasilan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja adalah sumber daya manusia (SDM).

Untuk melayani para pemangku kepentingan, Bank BPD DIY terus memunculkan berbagai inovasi termasuk layanan digital. Nasabah Bank BPD DIY sekarang dapat dilayani melalui aplikasi di telepon genggam eBPD DIY Mobilei. Melalui aplikasi tersebut nasabah dapat melakukan pembayaran secara daring terkait urusan dengan Pemerintah Daerah.

### Inovasi Produk

Seiring berkembangnya inovasi produk layanan, Bank BPD DIY membutuhkan SDM andal yang berbeda kompetensi dibanding sebelumnya. Bank BPD DIY tidak hanya membutuhkan SDM yang menguasai dan memiliki kompetensi di bidang perbankan, tapi juga mempunyai literasi data (mampu menganalisis, memaknai dan membuat keputusan berbasis data di bank). Juga literasi manusia (mampu memahami dan berinteraksi dengan pelanggan dan sesama rekan kerja) dan literasi teknologi (mampu menguasai alat dan teknologi dengan baik).

Kompetensi inti di bidang perbankan tentu tetap diperlukan. Antara lain pemahaman bisnis perbankan, kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi bisnis perbankan, analisis sektor industri

### Didi Achjari

yang menjadi target pemberian kredit. Juga hukum perbankan dan perkreditan, penilaian risiko kredit dan risiko operasional, analisa potensi pasar. Serta pengelolaan kredit usaha kecil dan menengah, dan kemampuan untuk melakukan komunikasi pemasaran secara efektif.

Tantangan yang dihadapi Bank BPD DIY akan makin besar. Tidak hanya persaingan antarbank tapi juga munculnya perubahan lingkungan bisnis. Di sisi lain, karyawan BPD DIY yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z juga dapat mempunyai ekspektasi gaya manajemen dan cara kerja yang berbeda. Misal bekerja dari mana saja dan keseimbangan kerja dan kehidupan. Isu pendanaan hijau (*green financing*) dan keberlanjutan (*sustainability*) juga akan mempengaruhi sektor mana yang akan diprioritaskan untuk diberi pinjaman. Selain itu isu privasi dan keamanan data nasabah juga menjadi isu yang makin sensitif di masa depan. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik akan berpotensi membahayakan reputasi.

### Lapak Daring

SDM unggul diperlukan BPD DIY untuk mengelola perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan lingkungan perbankan terlihat di berbagai bidang. Persaingan tidak lagi hanya dengan sesama bank tapi dengan lapak daring (*e-commerce*) yang menawarkan pembayaran secara cicilan, misal *paylater*. Perusahaan lapak daring juga mempunyai fitur pembayaran berbagai jasa misal listrik, air (PDAM), telepon, dan lain-lain. Pemba-

media, dibandingkan pada era media analog. Ketika pemantau menemukan problem pemberitaan, ia tidak bisa lagi secara langsung berdialog, menyampaikan masukan dan kritik kepada pengelola media. Platform digital yang makin canggih membuat jarak komunikasi, dan kerap kali kritik atas isi media oleh khalayak atau pemantau hanya dilayani oleh robot atau AI.

Memasuki akhir tahun 2024, keberadaan lembaga pemantau media tidak merata di Indonesia, bahkan cenderung mati suri. Mereka memiliki problematika klasik pendanaan, dan tantangan membangun kerja volunteerism yang makin langka. Dari segi organisasi, tampak belum ada standar organisasi lembaga pemantau seperti halnya organisasi jurnalis atau pers. Juga tidak ada standar kerja pemantauan yang baku, selaras dengan media digital.

Dewan Pers dan KPI kiranya perlu segera bertemu dan menggalang lahirnya lembaga pemantau media berbasis masyarakat yang lebih terstruktur dan tersebar merata. Peran dan posisi mereka jelas akan meringankan beban kedua lembaga negara ini. Budaya volunteerisme tetap dipertahankan, akan tetapi diperlukan standarisasi lembaga dan metode pemantauan. Untuk menjamin keberlanjutan, perlu ketersediaan dana abadi pemantauan media yang digalang dari industri media dan periklanan digital. □-d

\*) Prof Dr Masduki, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi UII

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Jangan Percaya 'Ganti Rugi' Aplikasi Online

KETIKA mengorder taksi online, maka kemudian akan muncul perkiraan waktu penjemputan, berapa menit. Kemudian di bawahnya akan muncul tulisan: 'berhak mendapatkan ganti Rp 10 ribu, jika sampai pukul sekian belum dijemput'. Benarkah hal itu?

Pengalaman saya kemarin Minggu (10/12) mengorder taksi online dari stasiun, sekitar pukul 20an. Sudah dapat taksi dengan perkiraan menunggu agak lama, 9 menit. Sejatinya taksi online ada di kawasan stasiun, namun di pintu selatan lumayan memutar dan jalanan ramai.

Saya mencoba sabar, karena jalanan ramai dan kebetulan kemudian turun hujan. Dan sejatinya,

saya juga ingin tahu narasi apa yang akan muncul bila waktu perkiraan telah lewat dari yang dibuat aplikasi. Lantas bagaimana ganti Rp 10 ribu tersebut. Ini menggelitik, karena belum pernah mendapat kisah mengenai hal ini. Sekali lagi bukan perkara uang.

Namun kemudian saya tersenyum sendiri, ketika pada menit yang sudah berakhir kemudian muncul tulisan: anda dapat menemukan pengemudi di area parkir atau penjemputan. Padahal dari pantauan, masih disebutkan 3 menit, masa tunggunya. Narasinya membuat saya tersenyum. Jadi jangan percaya apalagi berharap akan ganti rugi tersebut. Zonk. □-d

\*) Salsa SS, Wirobrajan Kota Yogyakarta

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atifati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Hariyadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 / mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)